

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Dan Efektivitasnya Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

Dari data yang diperoleh maka peneliti dapat menyimpulkan pelaksanaan kebijakan pembangunan sumber daya manusia serta efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas penduduk di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Dengan merumuskan terlebih dahulu indikator terkait pembangunan sumber daya manusia berdasarkan teori pengembangan sumber daya manusia oleh Soekidjo Notoatmodjo yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dalam kegiatan pembangunan, karena tanpa adanya pendidikan maka tidaklah mungkin dapat terjadi kemajuan pembangunan. Hal ini bisa kita lihat pada negara-negara maju bahwa kemajuan yang dicapai tidak lain adalah karena kemampuan sumber daya manusianya yang mumpuni. Kemajuan seperti bidang teknologi, industri dan lain sebagainya merupakan hasil dari kecerdasan, kreativitas, dan inovasi dari sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi. Dengan kecakapan yang dimiliki

dapat memungkinkan mereka mengolah sumber daya alam yang ada dengan baik sehingga kesejahteraan dapat tercapai.

Kemampuan tersebut dapat dikembangkan yaitu melalui pendidikan dengan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang kemudian dapat mengarahkan kepada sumber daya manusia yang profesional dan produktif. Semakin produktif sumber daya manusia yang ada tentu saja akan semakin menunjang dalam peningkatan penghasilan. Itu sebabnya peran pendidikan sangatlah penting dan tidak bisa diabaikan demi kemajuan pembangunan suatu bangsa.

Kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan untuk pengembangan potensi sumber daya manusia yakni meliputi kegiatan peningkatan pengetahuan, kemampuan penalaran, pengembangan karakter serta peningkatan keterampilan baik melalui pendidikan formal umum/kejuruan maupun melalui pendidikan informal seperti kegiatan berupa pelatihan.

Pengadaan kegiatan-kegiatan pendidikan tersebut akan dapat dilaksanakan dengan adanya dukungan dari pemerintah. Bantuan pemerintah dalam hal pengembangan kualitas dan kuantitas di bidang pendidikan sangatlah diharapkan untuk menunjang kegiatan pendidikan yang ada guna peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana, pengembangan mutu pendidikan, serta pengembangan layanan kemudahan akses yang diadakan pemerintah maka akan dapat meningkatkan kesempatan bagi penduduk untuk memperoleh dan meningkatkan kemampuan di bidang pendidikan.

Kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di bidang pendidikan ini berlandaskan pada pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sudah menjadi hak bagi masyarakat untuk mendapat pengajaran seperti yang tercantum dalam batang tubuh yakni Pasal 31 ayat 1 UUD 1945.

Mengenai peningkatan kualitas di bidang pendidikan pada Kecamatan Panjang, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia di Kecamatan Panjang, pemerintah melakukan tugas dan perannya dalam mendukung kemudahan akses bagi masyarakat di bidang pendidikan yang diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk dari segi pendidikan namun pada kenyataannya belum sepenuhnya efektif. Adapun yang telah dilakukan diantaranya adalah dengan pengadaan fasilitas pendidikan dengan penyediaan sekolah dari semua jenjang pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas. Namun penyebaran sekolah yang ada belum seluruhnya menjangkau ke setiap kelurahan di Kecamatan Panjang yang ditunjukkan dari data Kecamatan Panjang dalam angka bahwa masih ada Kelurahan yang belum sama sekali terdapat sekolah. Selain itu, sekolah yang ada belum memiliki kelengkapan fasilitas sekolah yang memadai secara keseluruhan yang ditunjukkan dari hasil penyebaran kuesioner kepada masyarakat Kecamatan Panjang. Kemudian juga lembaga pendidikan informal seperti kursus keterampilan dan pondok pesantren jumlahnya baru sedikit untuk menunjang peningkatan keterampilan penduduk yang jika dibandingkan dengan kecamatan lain

masih perlu adanya peningkatan seperti di Kecamatan Enggal yang jumlah kursus keterampilanya lebih banyak dan beragam serta di Kecamatan Rajabasa yang jumlah pondok pesantrennya lebih banyak.

Selain itu, dari hasil wawancara Camat Kecamatan Panjang yaitu Herni Musfi yang menjelaskan bahwa layanan pendidikan yang diberikan pemerintah seperti adanya layanan pendidikan gratis berupa pemberian beasiswa baik bagi siswa berprestasi maupun bagi yang tidak mampu sudah dilaksanakan. Namun ternyata belum cukup efektif dalam meningkatkan kualitas penduduk yang ditunjukkan dari hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar penduduk telah mengenal baca tulis tetapi masih ada sebagian penduduk yang tidak mengenal baca tulis, yang hal ini juga ditunjukkan dari data Kecamatan Panjang yaitu data penduduk menurut tingkat pendidikan Kecamatan Panjang Triwulan II 2016 yang menunjukkan masih terdapat penduduk yang buta huruf dalam jumlah yang signifikan di beberapa kelurahan yaitu Kelurahan Panjang Selatan, Way Lunik dan Ketapang Kuala. Kemudian dari aspek partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah, belum cukup efektif yang ditunjukkan dari hasil kuesioner serta wawancara kepada salah satu tokoh masyarakat Kelurahan Way Lunik yaitu Sutrisno yang menjelaskan bahwa masih ada sebagian anak usia sekolah yang tidak bersekolah baik karena memang tidak mengikuti sekolah maupun tidak selesai mengikuti sekolah, serta sebagian besar penduduk yang hanya menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun bahkan masih banyak yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar dan jarang penduduk yang

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Yang mana hal ini terjadi karena tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah terhadap pendidikan yang juga didukung dengan keterbatasan ekonomi.

Itu artinya, dengan fasilitas dan layanan yang ada dapat dikatakan belum cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan secara optimal.

2. Kesehatan

Selain pendidikan, aspek kesehatan juga tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya tingkat pendidikan yang tinggi, namun terjaminnya kesehatan secara memadai merupakan modal utama dalam peningkatan produktivitas. Terpenuhinya kebutuhan fisik akan kesehatan tentu akan memperlancar individu dalam melakukan aktivitas/pekerjaannya dengan baik, sehingga kemungkinan menambah penghasilan pun dapat dicapai. Dengan begitu, sangatlah penting untuk memperhatikan tingkat kesehatan suatu penduduk demi tercapainya produktivitas kerja yang tinggi sehingga kehidupan yang makmur sebagai tujuan pembangunan dapat terwujud.

Upaya peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan oleh pemerintah seperti melalui pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga kesehatan yang memadai. Kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan harus didukung secara baik agar

peningkatan kualitas kesehatan penduduk dapat terjamin terutama bagi masyarakat miskin.

Tingkat kesehatan yang baik dapat dilihat diantaranya dari angka kematian bayi dan balita, serta angka kematian ibu melahirkan, karena semakin tinggi angka kematian mencerminkan tingkat harapan hidup yang buruk sehingga dapat dikatakan kualitas kesehatan yang seperti itu adalah rendah. Kemudian sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menangani hal tersebut agar kesejahteraan penduduk dari segi kesehatan pun akan terjamin.

Terkait peningkatan kualitas penduduk dalam bidang kesehatan di Kecamatan Panjang maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut :

Upaya peningkatan kualitas penduduk Kecamatan Panjang dari segi kesehatan yang dilakukan pemerintah dengan melalui pengadaan fasilitas kesehatan yaitu penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta layanan yang membantu kemudahan penduduk untuk memperoleh pelayanan kesehatan melalui fasilitas JamKesMas dan layanan mobil antar jemput gratis yang terutama diperuntukkan bagi masyarakat miskin, dapat dikatakan cukup efektif yang ditunjukkan dari hasil kuesioner yang menyatakan bahwa tidak banyak terjadi kasus kematian bayi/balita dan ibu melahirkan. Sarana dan tenaga kesehatan yang tersedia, layanan JamKesMas yang sudah merata menjangkau masyarakat ternyata telah dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat karena minimalnya kasus kematian yakni kematian bayi/balita dan ibu melahirkan, meskipun masih ada satu kasus yang disebabkan kurangnya kepedulian dan

kesadaran sebagian kecil masyarakat akan pentingnya tindakan pencegahan sebelum darurat seperti hasil wawancara kepada ketua RT 07 Kelurahan Way Lunik yakni Sutrisno. Adanya kasus tersebut sudah semestinya menjadi pertimbangan agar tidak terjadi kemungkinan buruk di masa depan.

Keefektifan tersebut perlu dipertahankan agar peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kecamatan Panjang dapat selalu terjadi di masa yang akan datang. Terutama dari segi sarana dan tenaga kesehatan yang masih perlu ditingkatkan kuantitasnya terutama bagi kelurahan-kelurahan yang belum memadai sarana dan tenaga kesehatannya. Jika dibandingkan dengan Kecamatan lain seperti di Kecamatan Rajabasa dan Sukarame yang memiliki sarana dan tenaga kesehatan yang lebih memadai maka perlu menjadi contoh untuk meningkatkan ketersediaannya terutama di Kecamatan Panjang demi menciptakan pelayanan kesehatan yang menjangkau dan dekat ke seluruh masyarakat sampai ke pelosok. Tidak hanya itu, pelayanan kesehatan yang terjangkau dengan meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui layanan berobat gratis lebih ditingkatkan lagi, yang mana hal itu akan berimplikasi pada kemudahan akses yang lebih baik lagi sehingga peningkatan kualitas kesehatan masyarakat lebih terjamin. Terjaminnya kesehatan masyarakat maka akan memungkinkan kasus yang dapat menurunkan kualitas kesehatan seperti cacat dapat diminimalkan, mengingat Kecamatan Panjang dengan penyandang cacat terbanyak di Kota Bandar Lampung yang dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Sukarame yang paling

sedikit jumlah penyandang cacatnya maka kualitas kesehatan kecamatan Panjang dalam segi ini masih perlu diperbaiki lagi.

3. Ekonomi

Tingkat kesejahteraan penduduk salah satunya dapat dinilai dari segi ekonominya, yaitu meliputi tingkat pendapatan, kemiskinan, dan pengangguran. Semakin tinggi tingkat pendapatan suatu penduduk, rendahnya tingkat kemiskinan serta rendahnya tingkat pengangguran maka kesejahteraan ekonomi penduduk itu sendiri juga akan semakin baik.

Untuk mewujudkan hal itu, negara sudah seharusnya menjamin kemudahan bagi penduduk dalam hal memperoleh kesempatan kerja dengan melalui perluasan lapangan kerja ataupun bantuan bagi penduduk tidak mampu untuk memperoleh nafkah dan kehidupan yang layak. Kewajiban ini tercantum dalam batang tubuh yakni Pasal 27 ayat 2 serta Pasal 34 UUD 1945.

Dengan meningkatnya kesempatan kerja sudah barang tentu akan menaikkan tingkat partisipasi kerja dan mengurangi pengangguran yang kemudian tingkat pendapatan juga akan meningkat sehingga kemiskinan secara otomatis akan turut menurun. Selain itu, bantuan terhadap penduduk tidak mampu termasuk golongan fakir miskin akan mampu menaikkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka sehingga akan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Berkaitan upaya peningkatan kualitas hidup penduduk di bidang ekonomi pada Kecamatan Panjang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dalam hal ini pemerintah telah berperan sesuai perannya yakni memberikan kemudahan akses bagi pemenuhan kebutuhan hidup layak oleh masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja dan program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan tunai yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu seperti yang dikemukakan oleh Camat Kecamatan Panjang guna menunjang kualitas ekonomi masyarakat.

Namun, berdasarkan hasil kuesioner menunjukkan masih banyaknya kemiskinan yang terjadi, serta tingkat pengangguran yang cukup signifikan yang didukung kesempatan kerja yang masih cukup sulit maka dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas ekonomi penduduk Kecamatan Panjang belum cukup efektif.

Lapangan kerja yang tersedia, ternyata belum sepenuhnya menyerap tenaga kerja yang ada di Kecamatan Panjang yang terbukti dari hasil kuesioner yang menyatakan masih adanya pengangguran yang terjadi yang secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat dan juga berdampak pada terjadinya kemiskinan sehingga dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat yakni di bidang ekonomi.

Selain itu, tingkat kemiskinan yang cukup tinggi ditunjukkan dari data BPS yang menunjukkan jumlah keluarga prasejahtera di Kecamatan Panjang adalah yang terbanyak di antara kecamatan-kecamatan lain di Kota Bandar Lampung. Kondisi ini yang jika dibandingkan dengan Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Rajabasa yang dominan penduduknya berada pada tahap sejahtera II sampai III Plus, maka kondisi Kecamatan Panjang masih cukup memprihatinkan yang dominan

penduduknya berada pada tahap prasejahtera dan sejahtera I. Kemudian juga ditunjukkan dengan tingkat fakir miskin tertinggi di Kota Bandar Lampung yang jika dibandingkan dengan Kecamatan Enggal yang merupakan tingkat fakir miskin terendah maka kondisi Kecamatan Panjang masih perlu perbaikan serius dari segi ekonominya. Meskipun terjadi sedikit perbaikan dari menurunnya jumlah keluarga prasejahtera dan meningkatnya jumlah keluarga sejahtera III plus berdasarkan data Bandar Lampung dalam angka, namun perkembangannya belum secara signifikan mampu mengatasi kemiskinan secara optimal di Kecamatan Panjang mengingat jumlah fakir miskin yang semakin bertambah banyak dari setiap tahunnya yaitu tahun 2014-2015 berdasarkan data BPS Kota Bandar Lampung dalam angka 2015-2016.

Mengingat tujuan pembangunan yakni untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, maka kebijakan yang diterapkan diharapkan akan mampu memperbaiki tingkat hidup secara lebih baik. Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seyogyanya mampu membawa kehidupan ke arah yang lebih baik dengan meningkatnya kualitas hidup penduduk utamanya dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang diantaranya meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Jika keberhasilan itu telah terwujud maka dapat dikatakan bahwa suatu pembangunan yang dilakukan telah mencapai tujuannya, dan ketepatan sasaran dapat dilihat dari sejauh mana tujuan itu mampu dicapai.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia di Kecamatan Panjang ini dapat dikategorikan mampu mencapai keberhasilan yang cukup baik, terutama dalam bidang kesehatan yang mana hal ini ditunjukkan dari hasil penyebaran kuesioner yang menyatakan minimnya kasus kematian bayi/balita dan ibu melahirkan. Selain itu juga terjadinya penurunan angka penyandang cacat dari tahun 2014-2015 merupakan hal yang positif dalam peningkatan derajat kesehatan penduduk. Hal itu berarti upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan penduduk melalui pemberian kemudahan akses penduduk terhadap pelayanan kesehatan sudah terbilang efektif.

Hanya saja pemerataan penyediaan fasilitas kesehatan seperti sarana dan tenaga kesehatan yang memadai perlu ditingkatkan lagi jumlahnya sehingga tidak terpusat pada beberapa daerah saja dan dapat menjangkau ke semua daerah yang berada di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung. Yang pada akhirnya tidak hanya lebih mudah untuk memperoleh pelayanan kesehatan tetapi juga akan semakin lebih mudah dan memungkinkan pemenuhan kebutuhan akan kesehatan menjadi semakin lebih baik lagi dari kondisi saat ini yang memang sudah sangat baik.

Kemudian keberhasilan pada bidang pendidikan dan ekonomi masih perlu mendapat perhatian dikarenakan masih adanya aspek-aspek tertentu seperti buta huruf, masih terdapatnya anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah, rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan, kemiskinan yang masih banyak terjadi, serta pengangguran yang cukup signifikan. Permasalahan-permasalahan tersebut harus mendapat penanganan

yang lebih maksimal lagi agar jumlahnya tidak semakin bertambah di masa depan dan justru harus semakin berkurang sehingga tidak menghambat dalam proses pembangunan.

Dalam rangka mencapai tingkat hidup yang semakin lebih baik lagi maka upaya penanggulangan masalah di atas perlu ditingkatkan melalui penambahan dan pemerataan fasilitas pendidikan baik formal maupun nonformal, termasuk peningkatan penyediaan kelengkapan fasilitas sekolah yang memadai serta, pendirian sekolah baru bagi wilayah yang belum terdapat sekolah, pengembangan pendidikan menengah terutama menengah kejuruan, serta peningkatan layanan pendidikan terutama bagi penduduk tidak mampu lebih digalakkan secara maksimal sehingga akan dapat meningkatkan daya tampung dan jangkauan yang lebih luas terhadap penduduk.

Perihal peningkatan pengadaan fasilitas pendidikan nonformal seperti kursus keterampilan, pondok-pondok pesantren yang mana pendidikan seperti ini juga diperlukan untuk menunjang keterampilan penduduk di kecamatan Panjang perlu ditingkatkan kuantitas serta dikembangkan bidangnya dan diperluas jangkauannya demi pencapaian kualitas penduduk dalam produktivitas yang lebih baik sehingga kesempatan kerja yang lebih baik juga lebih mudah diperoleh bagi masyarakat. Mengingat jumlahnya yang masih minim di Kecamatan Panjang apabila dibandingkan dengan Kecamatan Enggal yang jumlah dan ragamnya lebih banyak sehingga tersedia pilihan lebih banyak bagi penduduk untuk mengembangkan keterampilan terutama yang dibutuhkan di dunia kerja, dan juga dari segi peningkatan religiusitas dan keterampilan melalui pondok pesantren untuk pengembangan karakter

masih harus ditingkatkan jumlah yang saat ini masih kurang untuk kebutuhan penduduk jika dibandingkan dengan Kecamatan Rajabasa yang jumlahnya lebih banyak dari Kecamatan Panjang.

Selain itu juga perluasan lapangan kerja yang dimaksudkan untuk memperkecil tingkat pengangguran lebih harus ditingkatkan lagi agar pendapatan meningkat dan kemiskinan dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan upaya peningkatan kualitas penduduk di Kecamatan Panjang dengan kebijakan yang ada sudah cukup efektif di bidang kesehatan namun belum sepenuhnya efektif di bidang pendidikan dan ekonomi. Penyiapan penduduk yang mempunyai kompetensi tinggi serta kompetitif masih perlu ditingkatkan secara terus-menerus melalui peningkatan penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang memadai dan merata yang mampu menjangkau hingga ke seluruh daerah terutama daerah-daerah terpencil.

Tidak hanya itu, peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terutama terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan perlu diupayakan melalui kegiatan seperti himbauan secara berkala dan terus-menerus. Upaya tersebut dimaksudkan agar terjalin kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, sehingga proses pembangunan terjadi bukan karena paksaan melainkan karena terjadi atas dasar kesadaran dari masing-masing pihak yaitu pemerintah dan terutama masyarakat itu sendiri. Jika hal itu dapat terlaksana dengan baik maka akan tercipta kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang lebih baik, kemudian kehidupan serba lebih baik dari hasil

pembangunan akan dapat dinikmati dan akhirnya mendorong terhadap kemajuan yang diinginkan.

B. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Guna Meningkatkan Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia (IPM) Menurut Perspektif Ekonomi Islam

1. Pendidikan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. dengan dibekali potensi untuk dapat hidup makmur dan sejahtera. Kesejahteraan hanya dapat diwujudkan dengan adanya kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya alam yang ada secara baik namun tetap berjalan sesuai kaidah dan aturan yang ditetapkan dalam syari'at Allah. Penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan tersebut dan membentuk sumber daya manusia berkualitas tinggi yang cerdas, kreatif, inovatif, dan kompetitif serta berkepribadian baik.

Dalam hal ini negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah pendidikan dengan melakukan pengadaan fasilitas pendidikan bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan akan pendidikan adalah hal yang wajib harus dipenuhi karena menyangkut kemaslahatan umum dan harus dinikmati oleh masyarakat secara menyeluruh. Kewajiban tersebut bukanlah tanpa landasan, melainkan sudah menjadi perintah Allah SWT bagi manusia untuk mewujudkannya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim.

Untuk menjamin terlaksananya kewajiban tersebut maka negara berkewajiban memenuhi sarana dan prasarana pendidikan kepada rakyat. Kewajiban mencari ilmu seperti yang sudah diterangkan dalam Islam harus dapat dipenuhi demi mencapai kemanfaatan dan kemaslahatan bersama.

Mengenai kebijakan pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan pada Kecamatan Panjang dengan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah melalui pengadaan fasilitas pendidikan formal maupun informal belum cukup optimal. Penyediaan fasilitas pendidikan formal masih perlu ditingkatkan lagi kuantitasnya melihat masih adanya kelurahan yang belum memiliki sekolah baik dari jenjang pendidikan dasar maupun menengah pertama dan menengah atas berdasarkan data BPS Kecamatan dalam angka dan juga kelengkapan fasilitas sekolah yang belum memadai ke seluruh sekolah yang ada berdasarkan hasil kuesioner, serta fasilitas pendidikan informal seperti pelatihan keterampilan masih perlu diadakan perluasan dan pengembangan agar bisa menjangkau ke seluruh penduduk sehingga nantinya dapat meningkatkan produktivitas penduduk.

Dengan begitu, upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan terutama pendidikan formal melalui pengadaan sarana dan prasarana sekolah masih perlu ditingkatkan lagi terutama dalam perluasan dan pengembangannya untuk dapat tersebar secara merata di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Panjang. Selain itu, layanan pemberian beasiswa dan bantuan bagi siswa kurang/tidak mampu dan

berprestasi belum mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti jenjang pendidikan yang tersedia, yang hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan pengetahuan penduduk terhadap pentingnya pendidikan sehingga menjadi kendala dalam peningkatan kualitas masyarakat, yang hal ini dibuktikan dari masih adanya penduduk buta huruf berdasarkan data penduduk menurut tingkat pendidikan Kecamatan Panjang Triwulan II tahun 2016 dengan jumlah yang cukup signifikan dan masih adanya sebagian kecil anak-anak putus sekolah. Masalah tersebut juga berdampak pada tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah yaitu rata-rata baru menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun dan bahkan yang baru menyelesaikan pendidikan tingkat dasar pun masih banyak.

Sehingga pada indikator pendidikan peran pemerintah melalui kebijakannya dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan sesuai perintah Islam dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Di lain sisi, partisipasi masyarakat yang belum optimal mencerminkan belum terpenuhinya kewajiban menuntut ilmu secara baik sesuai dengan hadits Rasulullah SAW.

2. Kesehatan

Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan indikator penting yang perlu diprioritaskan dalam mewujudkan kesejahteraan suatu bangsa. Penduduk yang selain profesional juga sehat adalah modal untuk memajukan kesejahteraan dan tanpa itu maka pembangunan tidak mungkin dapat dilakukan.

Adanya kemudahan dalam hal pemenuhan kebutuhan kesehatan bagi masyarakat akan memungkinkan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan akhirnya dapat memajukan pembangunan secara keseluruhan. Untuk itu, penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan, tenaga kesehatan, serta teratasinya masalah kesehatan telah dibebankan sebagai tugas negara yang wajib dilaksanakan seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW yang mendirikan tempat pengobatan untuk rakyatnya dan membiayai kegiatan tersebut melalui anggaran baitul mal.

Hal tersebut jelas mencerminkan bahwa Islam memberikan perhatian besar bagi berlangsungnya kesejahteraan umat di bidang kesehatan dan merupakan kewajiban negara untuk mengemban tugas tersebut sesuai yang diperintahkan agar pembangunan dapat berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hal tersebut, kebijakan pembangunan sumber daya manusia di bidang kesehatan pada Kecamatan Panjang sudah cukup baik. Hal ini ditandai dari tingkat kematian bayi/balita dan ibu melahirkan yang tidak banyak terjadi di Kecamatan Panjang, serta kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang didukung dengan layanan kesehatan seperti penyediaan layanan mobil antar jemput gratis bagi masyarakat tidak mampu serta layanan berobat gratis yang diwujudkan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (JamKesMas) sudah merata ke seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin. Namun upaya dari pemerintah melalui pengadaan fasilitas kesehatan perlu dioptimalkan dan diperluas lagi pengadaannya termasuk rumah sakit yang hingga saat ini belum tersedia di Kecamatan Panjang, jumlah sarana kesehatan lain seperti

poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu yang masih sedikit, serta jumlah tenaga kesehatan yang masih tertinggal mengingat tenaga kesehatan yang ada sebagian besar baru perawat sedangkan jumlah dokter yang ada belum begitu banyak jika dibandingkan dengan kecamatan lain seperti Kecamatan Sukarame dan Rajabasa yang termasuk sudah cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Disamping itu, kendala yang ada mengenai tingkat kesadaran masyarakat terhadap kesehatan terutama dalam hal tindakan pencegahan sebelum keadaan darurat masih perlu mendapatkan perhatian agar tidak terjadi kemungkinan buruk di masa yang akan datang.

Sesuai dengan teladan Rasulullah SAW, kewajiban dalam pemenuhan terhadap kebutuhan dasar di bidang kesehatan masih perlu dioptimalkan lagi dalam hal pengadaan sarana dan tenaga kesehatan yang ada serta kesadaran yang masih kurang terhadap pentingnya tindakan pencegahan darurat oleh sebagian kecil masyarakat harus diatasi agar nantinya tidak menghambat dalam peningkatan kualitas/derajat kesehatan masyarakat di masa depan.

3. Ekonomi

Pemenuhan terhadap kebutuhan pokok serta upaya dalam peningkatan kesejahteraan hidup merupakan tugas dari setiap individu yakni dengan bekerja. Bekerja adalah hal yang harus dan wajib dilakukan manusia demi terpenuhinya nafkah bagi hidup mereka. Hal ini telah diterangkan dalam al-qur'an surat Al-Mulk ayat 15 bahwa manusia

diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berusaha sendiri melalui bekerja.

Untuk mendukung hal tersebut, Islam mewajibkan bagi negara untuk memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mencari kerja dengan penyediaan lapangan kerja serta sarana-sarana kerja bagi masyarakat yang mampu untuk bekerja dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat.

Selain itu, negara juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok secara langsung bagi masyarakat yang tidak mampu meraih kemaslahatan itu maupun yang telah berusaha dengan kemampuannya akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya secara baik dan sempurna. Sebagai pengatur urusan rakyat, pemerintah wajib bertanggung jawab akan hal itu dan menanganinya sehingga kemasalahatan bersama dapat terpenuhi secara keseluruhan sepanjang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam.

Dalam konteks ini dapat diketahui bahwa kebijakan pembangunan sumber daya manusia kaitannya dalam bidang ekonomi belum berjalan cukup optimal karena terjadinya kenaikan jumlah partisipasi kerja berdasarkan data BPS dan data Kecamatan Panjang terhadap lapangan kerja yang tersedia di Kecamatan Panjang belum secara signifikan mengatasi pengangguran yang masih terjadi dalam tingkat yang signifikan berdasarkan hasil kuesioner.

Namun, dilihat dari semangat kerja penduduk sudah sangat tinggi yang tercermin dari sikap kerja keras mereka terhadap pekerjaan yang mereka miliki. Apapun pekerjaan yang ada mereka tekuni demi untuk bisa

memenuhi kebutuhan hidup keluarga, meskipun harus bekerja menjadi buruh lepas ataupun dengan upah yang mungkin belum bisa mencukupi kebutuhan mereka. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang menjadi alasan untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik dan upah yang lebih tinggi, tidak membuat mereka berputus asa dan selalu berupaya agar dapat memenuhi kewajiban mencari nafkah untuk diri dan keluarga mereka. Hal ini berarti sebagian masyarakat sudah memenuhi kewajiban untuk bekerja sesuai ketentuan dalam Islam, hanya saja kemudahan kesempatan kerja yang diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat belum optimal karena belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penduduk Kecamatan Panjang secara maksimal yang kemudian memunculkan pengangguran.

Di sisi lain, fenomena kemiskinan yang selalu menjadi problem di setiap wilayah, baik itu dalam jumlah kecil maupun besar. Termasuk di Kecamatan Panjang, kemiskinan masih banyak terjadi yang ditunjukkan dari jumlah keluarga pra sejahtera dan jumlah fakir miskin yang cukup tinggi. Pemerintah telah melakukan upaya penanggulangan terhadap masalah tersebut melalui program bantuan tunai bagi masyarakat miskin yang diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun pada realitanya bahwa kemampuan hidup masyarakat belum cukup baik dengan ditandai pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera dan peningkatan jumlah keluarga sejatera III plus yang belum maksimal serta peningkatan jumlah fakir miskin yang cukup signifikan dan masih tergolong yang paling banyak di antara kecamatan lain di Kota

Bandar Lampung. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa tanggung jawab serta kewajiban pemerintah belum terpenuhi secara optimal sebagaimana hadits Rasulullah SAW.

Pada konteks pembangunan sumber daya manusia di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, secara keseluruhan belum optimal dikarenakan masih terdapat hal-hal yang memungkinkan akan dapat menghambat kemajuan pembangunan terutama di bidang pendidikan dan ekonomi. Di bidang pendidikan yakni masih adanya jumlah penduduk buta huruf yang signifikan, rendahnya tingkat pendidikan penduduk, serta masih adanya sebagian anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Kemudian di bidang ekonomi seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup signifikan. Masalah yang ada masih harus ditangani secara lebih serius terutama dalam peningkatan partisipasi masyarakat yang masih kurang terhadap bidang pendidikan sebagai pilar utama untuk dampak positif pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesehatan.

Masalah tersebut menandakan kewajiban secara individu di sebagian masyarakat dalam hal mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan hidup belum dipenuhi secara baik. Sehingga kesinambungan dari pihak masyarakat dan pemerintah belum berjalan dengan seharusnya. Hal ini tentu perlu diatasi oleh pemerintah agar keadaan tersebut tidak berlarut dan dapat menghalangi dalam mencapai pembangunan yang optimal secara keseluruhan.